

PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 (Studi kasus Partisipasi Pemilih Perempuan di Kecamatan Sumbawa)

Edrial*, Sri Nurhidayati, Fikri Al Syatri

Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Email: edrial@universitassamawa.ac.id

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah serentak di Nusa Tenggara Barat membawa angin segar bagi terwujudnya partisipasi politik perempuan. Setelah dalam 7 masa kepemimpinan sebelumnya, baik gubernur dan wakil gubernur selalu diduduki oleh kaum laki-laki. Namun, dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 membawa warna yang berbeda dengan hadirnya Dr. H. Zulkiefliemansyah, SE berpasangan dengan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah M.Pd sebagai calon gubernur dan wakil gubernur NTB. Dengan adanya calon perempuan yang ikut dalam pilkada NTB tersebut, menjadi menarik untuk melihat partisipasi dan perilaku pemilih perempuan yang ada di kabupaten Sumbawa dan khususnya di kecamatan Sumbawa. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kata Kunci – *partisipasi, pemilih perempuan, gender, pilgub*

Diterima: Desember 2018



Dipublikasikan: Mei 2019

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pilkada secara langsung yang dimulai sejak tahun 2005 banyak menuai kritik karena tingkat partisipasi rakyat yang cenderung fluktuatif, sosialisasi yang tidak merata, dan penggunaan pos anggaran yang besar. Maka melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang peraturan Penetapan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014, diselenggarakanlah pilkada serentak di Indonesia. Pelaksanaan pilkada serentak (provinsi, kabupaten, dan kota) dimaksudkan guna melakukan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

Partisipasi merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi dan menjadi salah satu alasan dilaksanakannya pilkada serentak. Partisipasi merupakan keikutsertaan warga negara didalam proses politik (pilkada), baik sebagai kontestan maupun sebagai pemberi suara. Partisipasi perempuan dikancah perpolitikan nasional dan regional harus mendapat perhatian yang serius. Mengingat tingkat partisipasi perempuan dalam lingkup eksekutif dan legislatif dinilai masih sangat

minim. Hal ini bisa dilihat dari jumlah perempuan yang terlibat sebagai anggota parlemen dan yang menduduki jabatan strategis di daerah. Meski telah diakomodasi dengan kuota 30% oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, geliat perempuan dalam politik cenderung fluktuatif keberadaannya.

Tidak stabilnya tingkat partisipasi perempuan dan masih jauhnya dari target kuota 30%, menandakan kurangnya minat perempuan dalam kancah perpolitikan. Kurangnya minat perempuan dalam dunia politik, sebagai kausalitas image politik yang buruk dan kotor, budaya patriarki yang kental, dan penafsiran teks-teks agama secara misoginis bermuara pada ketidakadilan gender (Shintia Nuriyah Wahid, 2016:70). Pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB. Pada pelaksanaan pilkada serentak di Nusa Tenggara Barat diikuti oleh 4 pasangan calon, antara lain HM. Suhaili Fadil Thohir dan H. Moh. Amin (yang diusung oleh Partai Golkar, PKB, dan Nasdem), TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE., M.com (diusung oleh Partai Gerindra, PAN, PPP, Hanura, dan PBB), Dr. H. Zulkiefliemansyah,

SE berpasangan dengan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah M.Pd (diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat), dan H. Moch Ali Bin Dahlan dan TGH. L. Gede Wirasakti Amir Murni (maju melalui jalur perseorangan atau independen).

Pemilihan kepala daerah serentak di Nusa Tenggara Barat membawa angin segar bagi terwujudnya partisipasi politik perempuan. Setelah dalam 7 masa kepemimpinan sebelumnya, baik gubernur dan wakil gubernur selalu diduduki oleh kaum laki-laki. Namun, dengan hadir Dr. H. Zulkiefliemansyah, SE berpasangan dengan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah M.Pd sebagai calon gubernur dan wakil gubernur NTB. Visi dan Misi yang diusung oleh Sitti Rohmi, dengan berpatokan pada pembangunan yang berwawasan gender dimaksudkan untuk menarik hati pemilih perempuan, serta slogan coblos jilbab hijau mengandung makna bahwa perempuan telah hadir dalam politik dan siap memperbaiki hidup perempuan lainnya. Hadirnya calon wakil gubernur perempuan pertama di NTB dan jumlah pemilih perempuan di NTB yang lebih mendominasi 92.664 suara dari suara pemilih laki-laki, serta keberadaan 3 calon lainnya yang ikut melakukan mobilisasi massa terhadap suara perempuan seperti yang terlihat dimedia. Beberapa hal tersebut menarik minat peneliti, untuk melihat sejauh mana partisipasi pemilih perempuan dalam menentukan pilihannya pada Pilkada serentak 27 Juni 2018 yang lalu di NTB, serta faktor apa saja yang mempengaruhi pilihan politiknya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan memberikan gambaran tentang partisipasi dan perilaku politik pemilih perempuan terkait hadirnya Calon Wakil Gubernur (Cawagub) perempuan dalam pemilihan kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur NTB).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Gender

Didasarkan pada konsep gender menurut Mansour Fakih dalam Aziza Aulia

Fahmi (2017:31) adalah semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang biasa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya.

Dalam konsep lain yang disampaikan oleh Vitalaya (Dalam Ditaria 2016:4), gender merupakan konsep kesetaraan yang dibangun atas dasar penyamaan peran antara laki-laki dan perempuan, yang ditentukan oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi, tetapi tidak oleh faktor biologis. Pengarusutamaan Gender (PUG), atau dalam bahasa Inggris disebut *Gender Mainstreaming*, merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki, berhak atas: (1) Memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan, (2) Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan, (3) Mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan (4) Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Dalam konstalasi kebijakan, pengarusutamaan gender terimplementasi melalui kuota 30% bagi keterlibatan perempuan dipemerintahan. Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh Perseratus) keterwakila perempuan”. Undang-Undang ini merupakan respon bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender melalui perwakilan politik. Mengingat peran dunia politik sebagai aktor dasar dalam penentuan arah dan tujuan bernegara.

Dalam konteks partisipasi dan representasi perempuan dalam dunia politik

mengandung makna peningkatan keefektifan perempuan dalam mempengaruhi keputusan politik yang akan dapat menjamin hak-hak kelompok mereka dan masyarakat luas, serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

B. Tinjauan Partisipasi

Partisipasi adalah gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggungjawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta pemenuhan kebijaksanaan.

Pemberian ruang partisipasi masyarakat pada proses perjalanan tata kelola pemerintahan, bukan hanya dimaknai sebagai ajakan bagi masyarakat pada proses perencanaan kebijakan dan pembangunan. Tetapi sifatnya kesegala lini, baik keterlibatan dalam proses perencanaan, implementasi, evaluasi, respon, serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, kebijakan, dan lain sebagainya.

Dalam konteks pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), bentuk partisipasi yang digunakan adalah partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga Negara masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan hukum.

Menurut Mibrath dan Goel terdapat beberapa jenis partisipasi politik, adapun kategorinya sebagai berikut: (1). Partisipasi apatis, yakni orang yang menarik diri dari proses politik. (2) Partisipasi spektor, orang yang setidaknya pernah ikut dalam pemilihan umum. (3) Partisipasi gladiator, adalah orang yang terlibat aktif dalam proses politik, yakni komunikator dengan tugas khusus mempengaruhi pendirian orang lain. (4) Partisipasi pengkritik, adalah orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

C. Perilaku Pemilih Perempuan

1. Perilaku Pemilih

Dalam menganalisis perilaku pemilih dan untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai alasan oleh para pemilih dalam menjatuhkan pilihannya, oleh T. Irmayani (2012) digunakan tiga pola pendekatan, yaitu pendekatan sosiologi dari Columbia, pendekatan psikologis dengan mazhab Michigan, serta pendekatan pilihan rasional.

Pendekatan sosiologis merupakan salah satu metode dalam menentukan pemimpin yang mendominasi di Indonesia secara keseluruhan, pendekatan sosiologis berpatokan pada beberapa instrument, yaitu: 1) Status sosial ekonomi (pendidikan, jenis pekerjaan, dan pendapatan), 2) agama, 3) etnis, bahkan wilayah tempat tinggal (Leo Agustino dalam Kadir 2017:3).

Dikemukakan oleh Kadir (2017:3-4) bahwa terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam meninjau pola psikologis memilih pemimpin, yaitu:

a) Aspek kepartaian

Aspek kepartaian biasanya muncul karena keterlibatan orang tua dalam partai tertentu atau dikarena pilihan politik orang tua terhadap salah satu partai. Dalam kasus ini, sama halnya dengan pola beragama, saat orang tua telah mengidentikkan diri pada salah satu agama, maka anak pun akan mengikutinya. Sama halnya dengan pola pilihan partai politik. Afiliasi atas kepartaian ini biasanya dilakukan karena sosialisasi politik yang dilakukan oleh orang tua kepada anak dan sosialisasi politik oleh lingkungan sekitar.

Pengetahuan seseorang terhadap satu partai, akan membentuk kecenderungan untuk memilih calon yang diusung oleh partai dalam kontestasi politik manapun.

b) Aspek isu

Dalam perkembangannya, aspek isu atau orientasi terhadap isu sering juga dikaitkan dengan bagaimana membangun kesan politik (citra politik) agar pemilih cenderung kepada partai dan calon kepala daerah tertentu. Anatar membangun kesan terhadap partai melalui pemilihan isu yang dikenalkan kepada masyarakat memerlukan kerja ekstra dari kader partai.

c) Aspek orientasi

Faktor dari pendekatan ini yang tidak kalah penting adalah variable aspek (orientasi kadidat). Pengetahuan individu (pemilih) terhadap keberadaan kandidat akan berdampak pada posisi kandidat tersebut dalam Pilkada. Biasanya pemilih lebih cenderung memberikan evaluasi terhadap kandidat popularitas dalam suatu daerah pemerintahan, reputasi yang dimiliki kandidiat, dan kemampuan yang bersangkutan.

Pada dasarnya, pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang dibangun atas dasar identifikasi diri kepada salah satu partai. Hal ini terbangun karena adanya kedekatan yang dirasakan oleh konstituen pada salah satu partai, terlepas dari faktor apa yang membangun kedekatan tersebut.

Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan rasional, salah satu yang menjadi bahan pertimbangan politik dalam pendekatan ini adalah ada perkembangan isu-isu politik dan kandidat yang ikut serta dalam kontestasi. Dalam makna bahwa pemilih sudah jauh berfikir kedepan untuk melakukan

pertimbangan-pertimbangan rasional dalam menambatkan pilihan politiknya.

2. Pemilih Perempuan

Pemilih perempuan adalah warga negara Indonesia yang berhak memilih dalam pemilihan umum, baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilukada (UU.No. 10 tahun 2008). Dalam proses penentuan hingga pada tahap menentukan pilihan politik secara final oleh pemilih perempuan dipengaruhi oleh banyak hal, baik oleh pola sosialisasi, demografi, hubungan kekerabatan, dan lain sebagainya.

III. PEMBAHASAN

A. Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Gubernur NTB 2018

Jumlah calon Pemilih perempuan dalam pemilihan gubernur NTB tahun 2018 jika dilihat berdasarkan data pemilih tetap angkanya jauh lebih banyak dari pada pemilih laki-laki. Berikut ditampilkan DPT dan jumlah pengguna hak pilih di kecamatan Sumbawa, data dilansir dari KPUD Sumbawa sebagai berikut:

TABEL I
DAFTAR PEMILIH TETAP PER-KELURAHAN DI KECAMATAN SUMBAWA PADA PILGUB NTB 2018

No.	Kelurahan	TPS	DPT		
			L	P	L+P
1	Brangbara	12	2,127	2,452	4,579
2	Brangbiji	15	3,817	4,026	7,843
3	Bugis	14	2,287	2,428	4,715
4	Lempeh	10	1,533	1,620	3,153
5	Pekat	8	1,718	1,758	3,476
6	Samapuin	7	1,945	1,576	3,521
7	Seketeng	23	3,615	3,830	7,445
8	Uma Sima	12	1,814	1,963	3,777
JUMLAH		101	18,856	19,653	38,509

Sumber: Arsip KPUD Sumbawa 2018

TABEL III
PENGUNA HAK PILIH PER-KELURAHAN PADA PILGUB NTB 2018 DI KECAMATAN SUMBAWA

No.	Kelurahan	Pengguna Hak Pilih			Persentase		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Brangbara	1,633	1,948	3,581	76.77	79.45	78.20
2	Brangbiji	2,845	3,062	5,907	74.53	76.06	75.32
3	Bugis	1,688	1,797	3,485	73.81	74.01	73.91
4	Lempeh	1,222	1,327	2,549	79.71	81.91	80.84
5	Pekat	1,247	1,370	2,617	72.58	77.93	75.29
6	Samapuin	1,489	1,232	2,721	76.56	78.17	77.28
7	Seketeng	2,634	2,812	5,446	72.86	73.42	73.15
8	Uma Sima	1,309	1,401	2,710	72.16	71.37	71.75
JUMLAH		14,067	14,949	29,016	74.60	76.06	75.35

Sumber: Arsip KPUD Sumbawa, 2018

Pemilih perempuan sejauh pengamatan dilapangan dan melalui media sosial sangat antusias dengan keberadaan ibu Rohmi. Tetapi meskipun demikian, isu perempuan yang diwakili oleh ibu Rohmi kalah bersaing dengan isu putra daerah yang diwakili Dr. Zul. Jika diamati, isu yang berkembang pada tahun 2018 bukan rohmi nya yang ditonjolkan, tetapi lebih kepada Zul nya. Sehingga Pengaruh gender di Sumbawa sangat kurang. Masalah gender hanya terlihat sebagai isu-isu subordinat (isu pelengkap). Isu perempuan bukanlah isu strategis di pemilihan kemarin. Yang muncul adalah isu-isu primordial seperti kapan lagi bisa punya pemimpin dari etnis Sumbawa.

Keberadaan Sitti Rohmi yang mendampingi putra daerah Sumbawa Dr. Zulkiefliemansyah, dianggap kurang mampu memberikan kontribusi untuk menarik minat pemilih perempuan, jargon jilbab hijau kurang mampu mensugesti pemilih. Hal ini dikarenakan kerinduan masyarakat Sumbawa akan lahirnya pemimpin yang merupakan putra etnis Sumbawa. Selain itu, kontribusi yang di berikan oleh Dr. Zul menarik banyak minat pemilih, seperti dipengaruhi oleh familiarnya Dr. Zul di Sumbawa dalam memberikan kontribusinya pada dunia pendidikan. Isu jilbab kalah bersaing di Sumbawa

Kehadiran Rohmi sebagai cawagub dan isu gender ternyata kurang berpengaruh, hal ini juga di temukan pada pemilih perempuan dari etnis Lombok yang ada di kecamatan Sumbawa pun demikian. Isu Rohmi sebagai penyelamat gender kurang berpengaruh, yang dilihat justru pada latar belakang organisasi basis massa yang ada di belakang Rohmi (Nahdatul Wathan) dan juga bayang-bayang sosok ulama muda yang sekaligus sebagai Gubernur sebelumnya (Tuan Guru Bajang) yang merupakan saudara dari Rohmi. Sosok yang terlihat pada pencalonan Rohmi adalah adanya dukungan dari Tuan Guru Bajang (TGB).

Dalam memilih pemimpin, masyarakat sasak mempunyai budaya patuh terhadap pemimpin. Baik itu tokoh masyarakat, terlebih jika itu tokoh agama. Sementara itu

Masyarakat Sumbawa adalah masyarakat yang egaliter. Kalau di Lombok keputusannya dilandaskan pada *Sami'na Wa Atho'na*.

Keterpilihan pemimpin melalui isu-isu primordial merupakan bentuk pengetahuan politik masyarakat Sumbawa. Justru masyarakat Sumbawa sudah cerdas. Selama ini pemimpin datang dari pulau seberang. Dampaknya terjadi kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Jadi, saat masyarakat Sumbawa memilih atas dasar isu primordial. Merupakan bentuk kerinduan pada pembangunan dan kesehatan bagi masyarakat Sumbawa. Logikanya “saat orang kita yang naik, tentu dampaknya juga positif untuk kita”.

Terkait dengan tidak dilirikannya Sitti Rohmi di Pilgub (melalui isu gender), mengindikasikan bahwa masih banyak pemilih perempuan di kecamatan Sumbawa yang belum paham dan sadar gender. Problem dari kurang pahamnya perempuan adalah karena masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan gerakan yang dilakukan oleh para aktifis sosial. Utamanya saat berbicara tentang relasi gender dan politik, perempuan masih belum paham tentang fungsi keberadaan perempuan dalam politik. Sosialisasi dari pemerintah hanya 1 kali, ini salah satu penyebab perempuan masih kurang paham politik. perempuan Sumbawa dalam politik, masih pada tahap ikut-ikutan.

Track record Dr. Zul dalam membangun Sumbawa, isu primordial, serta isu kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan menjadi sentral pemilihan Dr. Zul dan Rohmi. Pemilih perempuan hanya melihat pada ketokohan, bukan gender. Cara pandang pemilih perempuan yang hanya melihat Rohmi sebagai tokoh perempuan, bukanya karena gender. Mengindikasikan perempuan, utamanya di Sumbawa secara umum belum paham fungsi keberadaan perempuan di kursi politik. Masih sekedar ikut-ikutan dan para pemilih masih bersifat konsumtif secara umumnya.

Jika diamati lagi maka pemilih perempuan berada pada semua tipe pemilih. perempuan saat dipilgub perempuan, lebih

bersifat transaksional. Pemilih perempuan memilih calon Gubernur asalnya. Ada ikatan emosional, memilih secara psikologis ada, rasional ada tetapi sangat kecil. Tipe pemilih ini ada seluruhnya diperempuan, ada peningkatan dari Pilgub 2013.

Keberadaan Rohmi sebagai tokoh perempuan yang mendampingi Dr. Zul sebagai putra daerah. Membuat fokus pemilih perempuan di Sumbawa dari berbagai etnis terbagi. Pemilih perempuan dari etnis Sumbawa dimobilisir atas nama Dr. Zul dan yang diluar etnis Sumbawa di mobilisir dengan mengedepankan tokoh perempuan.

Etnis Sumbawa memang dominan kesukuan (zul), kami tahu kami kalah dengan bahasa pilih orang kita. Tetapi disela-sela itu, mereka mengkampanyekan perempuan pilih perempuan. Perempuan dipakai manakala tempat melakukan sosialisasi bukan orang Sumbawa. Kalau untuk orang Sumbawa, yang dikampanyekan adalah Zul dan track recordnya. Etnis Sumbawa dimobilisasi atas nama Zul, dan pemilih perempuan diluar etnis Sumbawa di mobilisasi atas nama Rohmi.

Mobilisasi pemilih perempuan memang menjadi target keempat pasangan calon. Target mobilisasi pemilih perempuan di Tim Zul-Rohmi dijadikan sebagai prioritas, mengingat besarnya jumlah pemilih perempuan, bahkan Tim Zul-Rohmi membentuk khusus tim kartini dengan mendahulukan isu perempuan. Sistem kampanyenya *dor to dor*, dan pergerakan perempuan di Zul-Rohmi sangat kuat.

B. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Perempuan dengan Hadirnya Calon Wakil Gubernur Perempuan

Faktor yang mempengaruhi pilihan politik pemilih perempuan terbagi atas 4 hal, yaitu:

1. Faktor Keluarga

Nilai yang terbangun didalam keluarga, akan mampu mempengaruhi pilihan pemilih perempuan. Faktor keluarga di Pilgub NTB yang muncul adalah lebih kepada semangat kekeluargaan itu sendiri. Semangat kekeluargaan Sumbawa dan semangat kekeluargaan Lombok merupakan nilai yang timbul ke permukaan. Atas dasar semangat

ini, sebagai besar pemilih perempuan beretnis Sumbawa memilih Dr. Zul, dan semangat kekeluargaan Lombok dan garis kultural kekeluargaan NW memilih Sitti Rohmi. Bagi pemilih perempuan yang bukan merupakan bagian dari kedua etnis ini, faktor kekeluargaan dikesampingkan. Pegutamaa lebih pada keberadaan sosok perempuan, sesuai metode yang digunakan oleh Tim kampanye Kartini Zul-Rohmi.

2. Faktor Patriarki

Nuansa patriarki dinamika kehidupan sosial, terbawa hingga ke ranah perpolitikan. Pengaruh laki-laki dalam penentuan pilihan pemilih perempuan masih terlihat, ini berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh mbak Diana dari Solidartas Perempuan. Didaerah perkotaan, utamanya kecamatan Sumbawa sebagai tempat penulis melakukan penelitian. Budaya patriarki mulai terkikis, dari pengakuan informan perempuan. Penjatuhan pilihan mereka, atas dasar kemandirian berfikir.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan pemilih sangat berpengaruh pada penjatuhan pilihan pemilih perempuan. Pendidikan dalam lingkup formal (sekolah) dan non-formal (aktif di organisasi), berpengaruh pada daya fikir pemilih perempuan. Pemilih perempuan dengan pendidikan formal setingkat SD sampai SMA belum mengerti fungsi politik dan gender bagi kaum perempuan. Ini berpengaruh pada pilihan politiknya, baik memilih Rohmi hanya atas dasar dia perempuan maupun tidak memilihnya. Bagi pemilih perempuan dengan tingkat pendidikan formal strata S1 keatas dan yang aktif dalam pendidikan informal, pemahaman keberadaan perempuan dalam politik sudah terbentuk. Hal ini berpengaruh pada penjatuhan pilihan pemilih perempuan.

4. Faktor Sosialisasi

Sosialisasi ada proses tranmisi nilai kepada suatu golongan masyarakat. Sosialisasi keberadaan perempuan dalam politik dan pemahaman gender dari pihak penyelenggara masih dikatakan kurang. Ini bisa dipahami oleh karena keterbatasan personil dan anggaran, dan jarak tempat serta jumlah masyarakat pemilih yang tidak sedikit

jumlahnya. Kehadiran LSM berbasis gender menjadi salah satu jawab dari kendala diatas. Tetapi justru muncul kendala, kepedulian LSM dalam mengangkat isu perempuan dalam politik masih sangat kurang. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh tim kampanye

dan pasangan calon yang aktif, berpengaruh pada pilihan pemilih perempuan. Massifnya gerakan tim Kartini, mampu menggeelontorkan banyak suara bagi pasangan Zul-Rohmi.

SIMPULAN

Partisipasi pemilih perempuan dengan hadirnya calon wakil gubernur perempuan, mendampingi Dr. Zulkiefliemansyah sebagai calon gubernur yang notabena seorang putra daerah yang dirindukan serta keberadaan figure Zainul Majdi atau kerap disapa TGB dan basis massa Nahdatul Wathan. Menghasilkan dampak yang berbeda pada partisipasi pemilih perempuan.

Partisipasi pemilih perempuan dengan keberadaan Sitti Rohmi di Kecamatan Sumbawa berada pada 4 ruang partisipasi, yaitu: partisipasi apatis, partisipasi spektor, partisipasi gladiator, serta partisipasi pengkritik

Pemahaman politik pemilih perempuan di Sumbawa secara general masih pada tahap pembolehan perempuan terlibat didunia politik. Ini mengindikasikan pemahaman gender pemilih perempuan masih pada kulit luarnya saja.

Kolaborasi ke sukuan antara Dr. Zul dan hj. Sitti Rohmi, mengundang nuansa keterpilihan atas dasar semangat primordialisme. Temuan dari hasil wawancara berbicara bahwa isu primordialisme memang menjadi bagian terhangat dari bungkusan kampanye kedua pasangan ini.

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Perempuan dengan Hadirnya Calon Wakil Gubernur Perempuan antara lain faktor Keluarga, Patriarki, tingkat Pendidikan, kurangnya Sosialisasi dari pemerintah dan dari LSM maupun kalangan aktivis perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Iranto.2015. *Perilaku Politik Pemilih Perempuan Kota Mojokerto Pada Pemilu Legislatif 2014*. Jakarta: Jurnal Penelitian Komunikasi: Vol.18, No.2.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

S Salosa, Daniel. 2005. *Pilkada Langsung*. Yogyakarta: Media Presindo

Siregar, Amir Effendi. 2 Juni 2009. *Representasi Politik Perempuan: Sekedar Ada atau Pemberi Warna*. Jakarta: Jurnal Sosial Demokrasi: Vol.6

UU Nomor 10 Tahun 2010 *Tentang Pemilu*

UU Nomor 15 Tahun 2011 *Tentang Penyelenggara Pemilu*

UU Nomor 2 Tahun 2008 *Tentang Partai Politik*

UU Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*

UU Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*

UU Nomor 8 tahun 2015 *Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU*.